Monitoring Caturwulan Pertama PPTRA

Di penghujung bulan April 2018, PPTRA melakukan monitoring kegiatan teknis dan keuangan di ruang pertemuan Darmawan Park, Babakanmadang, Bogor. Aktivitas ini diikuti oleh seluruh karyawan PPTRA, baik ASN dan non ASN. Kepala PPTRA, Mulyanto Darmawan menegaskan bahwa monitoring teknis dan keuangan merupakan *tools* yang sangat efektif untuk mengevaluasi kegiatan 4 bulan pertama, perencanaan ke depan, dan mengurai masalah sehingga cepat memperoleh solusi serta penanganannya. Semua elemen di PPTRA cukup intensif mendengarkan arahan dan menindaklanjuti untuk pelaksanaan 8 bulan ke depan.

Perkembangan serapan keuangan di PPTRA pada caturwulan pertama mencapai 5,38%. Angka ini teralokasikan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinasi antar Kementerian/Lembaga, asistensi dan supervisi tata ruang, termasuk aktivitas *workshop* percepatan tata ruang, kegiatan atlas, dan dinamika sumberdaya. PPTRA cukup optimis dalam dua bulan ke depan akan meningkat seiring aktivitas pekerjaan jasa konsultansi yang sudah mulai berjalan. Dari sisi teknis, masing-masing penanggung jawab kegiatan memaparkan aktivitas kemajuan pekerjaan terutama tentang aktivitas teknis internal dan koordinasi eksternal.

Tidak sebatas pemaparan, forum ini sekaligus juga sebagai ajang pembelajaran bersama antar bidang yang ada di PPTRA sehingga bila ada kebutuhan dari satu bidang dapat di *support* oleh bidang lain. Forum monitoring juga menjadi ajang tanya jawab ilmiah mengenai hal-hal teknis, metode pekerjaan, dan cara analisisnya. Sebagai contoh bagaimana analisis geospasial tematik sosial dikaitkan dengan tata ruang yang telah ditetapkan. Contoh lain, bagaimana hasil dinamika sumberdaya wilayah dapat menjadi salah satu alat masukan bagi review tata ruang wilayah. **[Fakhruddin M, 2018]**

PROGRES ASISTENSI & SUPERVISI PETA TATA RUANG

Statistik Asistensi dan Supervisi Periode Januari - April 2018

Asistensi Peta RTR	Jan	Feb	Mar	Apr	Total
RTRW Nasional	0	0	0	0	0
KS Nasional	2	1	3	0	6
RTRW Provinsi	3	4	1	0	8
KS Provinsi	1	0	1	0	2
RTRW Kab/Kota	16	25	63	60	164
KS Kab/Kota	1	8	6	2	17
RDTR	50	144	162	80	436
Jumlah	73	182	236	142	633

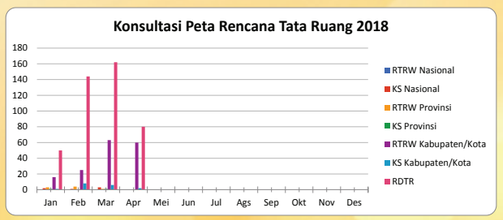

Jumlah Surat Rekomendasi Jan-April 2018

RDTR : 19 Rekomendasi
RTRW Kab/Kota: 5 Rekomendasi
RTRW Provinsi : 2 Rekomendasi
Kawasan Stategis Nasional : 1 Rekomendasi

Seputar Lelang PPTRA 2018

Daftar Perusahaan Pemenang Lelang PPTRA 2018

Nama Perusahaan	Nama Paket
PT. Gitamandalaksana Consultan	Pemodelan Dinamika Spasial KEK MBTK
PT. Webgis Indonesia	Permodelan Dinamika Spasial KSPN Mandalika
PT. Shiddiq Sarana Mulya	Pemetaan Sosial Untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan
PT. GeoSpatial InfiDinamika KSO PT. Das Map Indonesia	Permodelan Dinamika Spasial Bandar Kayangan
PT. Miranthi Konsultan Permai	

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Gedung F Lantai 2
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp - PPTRA : (021) 8764613
Fax - PPTRA : (021) 8764613
Email : redaksi.ptra@gmail.com
Twitter: @pptra_big
http://big.go.id/newsletter/

Edisi APRIL 2018

TATA RUANG & ATLAS NEWSLETTER

MEDIA INFORMASI PEMETAAN TATA RUANG, DINAMIKA SUMBERDAYA, DAN ATLAS

CATATAN BERANDA

Selaku PPK baru sekaligus merangkap Kepala Pusat yang mengurusi teknis, isu sertifikasi kompetensi dan revisi mulai terlihat sangat mempengaruhi kegiatan, terutama untuk pekerjaan penyedia jasa konsultansi yang tanda tangan kontraknya sudah dimulai bulan April ini. Masih ada beberapa kegiatan jasa konsultansi akan menyusul tanda tangan kontrak. Penandatanganan kontrak di bulan April boleh dibilang cukup riskan, terlebih untuk pekerjaan yang memerlukan waktu panjang lebih dari 8 bulan sangat tidak dimungkinkan. Lambatnya penandatanganan kontrak tahun ini tentunya berdampak pada mundurnya pekerjaan teknis. Keterlambatan ini salah satunya disebabkan oleh lambatnya pelelangan karena isu sertifikasi tenaga penyedia jasa tersebut. Beberapa kegiatan bahkan ada yang sampai empat kali lelang ulang karena tidak ada satupun penyedia jasa yang memenuhi persyaratan kompetensi.

Terhitung awal tahun 2018 kebijakan BIG menetapkan bahwa setiap pekerjaan jasa konsultansi, harus memiliki sertifikasi keahlian informasi geospasial (IG) meliputi penginderaan jauh, GIS, fotogrametri, survei terestris, kartografi, hidrografi, dan ahli kewilayahan. Seperti diketahui penyedia jasa yang selama ini melakukan pekerjaan di BIG, sebagian besar tidak bersertifikasi IG. Hal ini karena pada saat itu sertifikasi IG masih terus di proses dan menuju ke arah yang lebih baik dan belum diberlakukan tahun tahun sebelumnya. Seperti dilema buah simalakama, membiarkan pekerjaan jasa konsultansi tanpa sertifikasi kompetensi sama saja membeli kucing dalam karung. Sementara mewajibkan penyedia jasa bersertifikasi IG akan mengakibatkan banyaknya kontrak yang gagal. Kami memilih opsi ke dua, perlu sertifikasi walaupun harus menanggung akibat mundurnya kegiatan.

Sertifikasi itu penting untuk menjamin kualitas produk, tetapi tidak jauh lebih penting dari kewajiban menyelesaikan program yang ada. Oleh karena itu, penerapan sertifikasi kami usulkan diterapkan secara bertahap. Selain isu sertifikasi, lambannya proses revisi DIPA menjadi kendala lambatnya penandatanganan kontrak. Tampak pemerintah sangat berhati-hati dalam menerima revisi DIPA, padahal realitas di lapangan banyak pekerjaan yang memerlukan penyesuaian. Seharusnya semangat debirokrasi dan deregulasi tidak menyebabkan pengetatan revisi DIPA. Semoga tahun mendatang kebijakan sertifikasi dan revisi DIPA bisa lebih baik dari tahun ini. Selamat memasuki dunia kompetensi dan sertifikasi. **[Mulyanto Darmawan, 2018]**

ISU STATEGIS & INFO KEBIJAKAN

Peta Sebagai Sarana Geoliterasi Inklusi

Peta merupakan salah satu bentuk informasi geospasial yang paling populer, baik dalam bentuk peta dasar maupun tematik. Peta digunakan sebagai sarana dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pengambilan keputusan dalam pembangunan. Peta juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mencerdaskan bangsa, baik digunakan pada satuan pendidikan formal, nonformal, maupun informal.

Sejalan dengan program global terkait pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (SDGs), peta memegang peran penting untuk mendukung pencapaian tujuan di hampir semua pilar. TPB secara spesifik menyasar pada pihak yang rentan, sehingga diharapkan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal *"no one left behind"*. Terkait dengan prinsip TPB tersebut, peta atau IG yang dihasilkan oleh BIG harus bermanfaat bagi masyarakat terutama kelompok yang rentan.

Salah satu produk Pusat PTRA yaitu Atlas Taktual yang telah disusun sejak 2010 hingga sekarang, masih sangat relevan dengan TPB tersebut, namun harus terus dikembangkan. Potensi pengembangan kedepan adalah pembuatan Atlas Taktual Audio. Atlas ini merupakan kombinasi antara atlas taktual yang diproduksi dengan fasilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas netra mendengarkan informasi spasial lainnya, sehingga informasi yang diterima menjadi lebih banyak. Pusat PTRA berharap masyarakat penyandang disabilitas netra ini memperoleh informasi geospasial yang intensif dan sejajar dengan masyarakat yang lain. Jadi, tidak terlalu berlebihan jika kita mengatakan "Peta Taktual sebagai Sarana Geoliterasi Inklusi", karena menyasar pada kelompok rentan dan minoritas **[Niendyawati, 2018].**

REDAKSI:
| **Penanggung Jawab :** Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | **Tim Redaksi:** Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas |
| **Editor: Mulyanto Darmawan,** Fakhruddin Mustofa , Sri Eka Wati, Roswidyatmoko D., Randhi Atiqi, Chintia Dewi |
| **Desain Tata Letak:** Ika Rosalika |

Workshop Percepatan Penyelesaian Peta Rencana Tata Ruang di Provinsi Jawa Tengah

Paparan Narasumber

Pada tanggal 17-19 April 2018, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas BIG, bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, serta PPIDS Universitas Diponegoro melaksanakan *Workshop* Percepatan Penyelesaian Peta Rencana Tata Ruang di Hotel Chanti, Semarang. Hadir dalam acara ini pejabat struktural dan tim teknis dari 20 Kabupaten/ Kota yang sedang merevisi Peta RTRW serta 10 Kabupaten/Kota yang sedang menyusun Peta RDTR.

Acara ini dibuka oleh Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Dr. Nurwadjedi. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian penyusunan Peta RDTR maupun RTRW. Kegiatan ini bersifat 'jemput bola' atau BIG secara aktif ke daerah dengan harapan bisa meningkatkan jumlah daerah yang mendapatkan rekomendasi perpetaan. Prasetyo Budie Yuwono, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah menyambut baik program ini dan berharap bisa dilaksanakan secara berkala. *Workshop* ini diharapkan dapat meningkatkan status penyelesaian peta tata ruang di Jawa Tengah, juga menjadi bagian mempercepat pengesahan perda terkait RDTR dan RTRW. Beliau juga menyampaikan adanya perubahan-perubahan regulasi dalam penyusunan RDTR dan RTRW yang berkaitan dengan pemberian persetujuan substansi di Kementerian ATR/BPN. Turut hadir pula Ir. Bambang Sudarsono, MS sebagai perwakilan dari PPIDS Universitas Diponegoro. Dalam arahannya, Ir. Bambang Sudarsono, MS menyampaikan bahwa saat ini mendukung penuh proses asistensi dan supervisi dengan pelibatan PPIDS Universitas Diponegoro. Harapannya bisa membantu mempercepat penyelesaian Peta Rencana Tata Ruang di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam *workshop* dilakukan kegiatan teknis berupa klinik asistensi dan supervisi RTRW dan RDTR. Tim teknis perwakilan kabupaten/kota secara intensif dan kerjasama yang baik mengikuti aktivitas asistensi dan supervisi. Pemerintah daerah dan provinsi menyambut sangat antusias serta mengapresiasi kegiatan ini. Tim BIG hadir dengan 5 orang personil untuk melakukan asistensi dan supervisi. Masing-masing supervisor memegang dua kabupaten/kota untuk setiap harinya.

Salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah adanya peningkatan status capaian dari penyusunan Peta RTR, yang memiliki bobot kemajuan mulai dari 1 hingga 8. Hingga saat ini, dari data statistik status peta tata ruang tercatat jumlah rekomendasi di Provinsi Jawa Tengah masih minim. Hal ini tidak selaras dengan catatan pertemuan asistensi dari Jawa Tengah yang cukup intensif tiap pekannya di BIG. Oleh karena itu, melalui *workshop* ini diharapkan Peta RDTR dan RTRW yang sudah mencapai status 4 (selesai peta dasar), bisa dipercepat penyelesaiannya sampai mendapatkan rekomendasi sebagai syarat persub dan pengesahan perda. **[Chintia Dewi, 2018]**

POTRET KEGIATAN

KOORDINASI INTENSIF PENYUSUNAN PETA MUDIK 2018

FDG Peta Mudik 2018

Meneruskan keberhasilan Peta Mudik 2017, BIG melalui PPTRA mulai terlibat langsung dalam penyusunan peta navigasi untuk para pemudik di momen lebaran 2018. Sebagai catatan, Peta Mudik 2017 dapat tersedia dengan baik dan cukup sukses didistribusikan ke beberapa lokasi. Hasil tersebut akan teruskan pada tahun 2018 mengingat pembangunan infrastruktur transportasi cukup masif sehingga perlu diketahui pemudik secara *up to date*. Beberapa infrastruktur tersebut antara lain ruas jalan tol baru yang dibuka untuk menunjang pergerakan arus mudik lebaran.

Peta Mudik 2018 sebagai bagian pengembangan sebelumnya, disusun bekerjasama dengan ITENAS Bandung, Korlantas, dan pihak terkait lainnya. Pengembangan terutama dengan menambah informasi pendukung dan juga memperluas cakupan wilayah menjadi Jawa dan Sumatera. Sebagai bentuk koordinasi awal, pertemuan dengan pihak ITENAS dilaksanakan pada tanggal 13 April 2018 dan 25 April 2018. Melalui pertemuan yang intensif, pihak PPTRA dan ITENAS sepakat untuk menjadikan Peta Mudik Lebaran Jawa dan Sumatera 2018 sebagai peta navigasi dengan informasi yang lengkap dan dapat membantu pemudik dalam menentukan jalur alternatif tercepat untuk mencapai kampung halaman tercinta. **[Satrio Jati, 2018]**

BIG Berikan Rekomendasi Peta RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Pinrang

Pada tanggal 9 April 2018, bertempat di Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, diadakan rapat pleno dalam rangka pemberian surat rekomendasi untuk Peta RDTR dan PZ (Peraturan Zonasi) Kawasan Perkotaan Pinrang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai catatan, pemberian rekomendasi ini merupakan yang ke 18 di tahun 2018. Pleno dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Dr.Ir. Mulyanto Darmawan, M.Sc., dihadiri oleh Asisten Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kab. Pinrang, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan serta dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pinrang.

Peta RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Pinrang disusun untuk mengatur tata ruang di area Perkotaan Pinrang yang saat ini cukup padat. Pembangunan cukup pesat karena Perkotaan Pinrang dilalui oleh Jalan Lintas Poros Trans Sulawesi yang merupakan pusat kegiatan dan jalur utama aktivitas pergerakan masyarakat. Oleh karena itu, Peta RDTR dan PZ ini sangat diperlukan untuk mengatur agar pembangunan lebih terarah dan tidak bertentangan dengan peraturan tata ruang.

Setelah Peta RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Pinrang ini selesai, Pemerintah Kabupaten Pinrang akan menyusun beberapa Rencana Detail Tata Ruang lokasi lain yang cukup strategis dan penting juga untuk diatur tata ruangnya. Penyelesaian peta RDTR cukup terbantu karena sumber data berupa citra satelit telah tersedia dan terkoreksi geometris bersamaan dengan penyusunan Peta RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Pinrang. Kondisi ini mempermudah langkah selanjutnya berupa langsung menyusun Peta Dasar. Diharapkan untuk Peta RDTR lokasi lain akan lebih cepat dalam proses penyusunannya.

Dengan selesainya Peta RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Pinrang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Pinrang. Peta ini menjadi acuan dalam mengatur ruang secara lebih baik yang memperhatikan keseimbangan antara ruang terbangun dan lingkungan sekitarnya. **[Suspima Wulandari, 2018]**

Penyerahan Surat Rekomendasi

Memaknai Karunia Gunungapi

FDG Atlas Bentang Sumberdaya lahan Gunungapi

Deretan gunungapi membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara hingga Kepulauan Maluku dan Sulawesi bagian utara. Sebuah deretan yang membentuk pola melingkar, berpola sama dengan lokasi tumbukan lempeng Australia, Eurasia, Pasifik, dan lempeng Filipina. Tak mengherankan bila Indonesia menjadi bagian dari *ring of fire* atau cincin gunungapi dunia. Tingkat kerawanan terhadap bencana gunungapi cukup tinggi, terutama dampak letusannya.

Namun dibalik itu, keberadaan gunungapi sesungguhnya menyimpan ribuan karunia dari Illahi berupa sumberdaya yang tak ternilai harganya, baik sumberdaya alam dan budaya yang berada disekitarnya. Lahan pertanian subur melimpah ruah, mata air yang selalu tercurah, budaya dan kearifan lokal yang terarah, merupakan sebagian kecil dari karunia keberadaan gunungapi. Lahan-lahan subur dan mata air tersebut umumnya berada di sekeliling gunungapi, sedangkan budaya dan *local wisdom* tumbuh berkembang sebagai bagian penduduk hidup berdampingan dengan wilayah gunungapi.

Informasi geospasial bentang sumberdaya lahan gunungapi yang tersaji dalam bentuk atlas, menjadi bagian BIG dalam merekam karunia tersebut agar dipahami secara luas oleh publik. Diskusi intensif bersama pakar sumberdaya lahan telah dilaksanakan oleh PPTRA di Universitas Gadjah Mada, tanggal 24 April 2018. Hasil diskusi merumuskan kerangka utama penyusunan atlas secara terstruktur dan komprehensif antar tematik terkait kegunungapian. **[Fakhruddin M, 2018]**

PEMBINAAN IGT DINAMIKA SUMBERDAYA UNTUK OPD JAWA TENGAH

Suasana Pembinaan IGT Dinamika Sumberdaya

Informasi Geospasial berperan penting sebagai instrumen keruangan/spasial dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu instrumen spasial yang digunakan adalah Neraca Sumberdaya Alam (NSDA). Amanat Permendagri 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini juga sejalan dengan salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang efisien pada tahun 2030. NSDA digunakan sebagai input dalam menyusun KLHS yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini memperkuat keputusan tahun 2012 antara BIG bersama dengan Kementerian Dalam Negeri yang telah mengeluarkan Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala BIG Nomor 660/2367/SJ/83.KA/RT/6/2012 tentang Penyusunan NSDA Daerah.

Untuk mendorong daerah menyusun NSDA maka PPTRA melakukan pembinaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan akademisi di Kota Semarang. Acara berlangsung di Semarang tanggal 24 April 2018, dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dr. Ir. Sri Puryono KS. Beliau menyampaikan Jawa Tengah berkomitmen dalam pelaksanaan tata ruang dengan memanfaatkan input NSDA bersama KLHS sebagai instrumen dalam perencanaan dan evaluasi tata ruang. Paparan lain dari Habib Subagio mewakili Deputi IGT BIG menyampaikan pembinaan IGT Dinamika Sumberdaya untuk meningkatkan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam penyusunan NSDA sebagai bagian informasi perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup, penyediaan informasi cadangan-potensi-pemanfaatan sumberdaya alam, serta sebagai instrumen dalam perencanaan maupun evaluasi penyelenggaraan penataan ruang, mengacu pada SNI penyusunan neraca spasial 4 komponen SDA (hutan, lahan, air, dan minerba).

Berbagai narasumber terkait NSDA hadir dalam acara tersebut. Yudhi Timor Bimo Prakoso (Kemendagri) menyampaikan peran pemda dalam penyusunan NSDA daerah untuk mendukung pencapaian SDGs. Ubaidillah Salabi (KLHK) memaparkan program neraca sumberdaya hutan. Sedangkan Dheny Widhiyatna (ESDM) menjelaskan penyusunan neraca sumberdaya mineral batubara dan panas bumi. IGT potensi sumberdaya mineral, batubara dan panas bumi merupakan salah satu Paket Kebijakan Jokowi Jilid VIII dan telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Tingkat Ketelitian Skala 1 : 50.000. Sukiptyah (Kemen ATR/ BPN) menyampaikan materi tentang neraca penatagunaan tanah (NPGT), pemateri lain yaitu Waluyo (PUPERA) memaparkan neraca spasial sumberdaya air. Neraca sumberdaya air penting dilakukan untuk menghitung ketersediaan dan kebutuhan air apakah suatu wilayah mengalami surplus atau defisit. Dari BIG menghadirkan Gunawan yang menyajikan integrasi neraca sumberdaya untuk memberikan *value added* pemanfaatan NSDA. Pemerintah Daerah juga berharap Pembinaan IGT Dinamika Sumberdaya mampu meningkatkan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam penyusunan NSDA. **[Roswidyatmoko Dwihatmojo, 2018]**

Baca Resensi buku

PENGEMBANGAN WILAYAH PERDESAAN (PERSPEKTIF KERUANGAN)

"Secara sosial ekonomi dan lingkungan, desa memiliki hubungan dinamik dengan wilayah lainnya khususnya kota. Namun faktanya pola kebijakan yang bias kota mengakibatkan hubungan tersebut berlangsung tidak seimbang sehingga wilayah perdesaan mengalami permasalahan-permasalahan internal dan eksternal yang makin meningkat dan menghambat perwujudan tujuan pengembangan wilayah perdesaan yang produktif, berdaya saing, dan nyaman". Kalimat yang tertera dalam pengantar buku ini dapat memberikan gambaran umum kondisi dinamika perkembangan wilayah perdesaan yang terjadi saat ini.

Pada bagian awal, buku ini menyajikan profil, problematika serta peluang dan tantangan wilayah perdesaan Indonesia yang disambung dengan pembahasan terhadap karakteristik wilayah perdesaan.

Kemudian pada bab berikutnya diuraikan mengenai model, strategi, dan modal sosial dalam pengembangan kawasan perdesaan. Selanjutnya penulis mengulas tentang tata ruang perdesaan secara lugas, diantaranya menyangkut kebijakan dan strategi penataan ruang perdesaan, tata ruang kawasan perdesaan, teknik penyusunan rencana kawasan perdesaan, serta pengendalian tata ruang desa. Uraian ini cukup relevan di saat Indonesia sedang membangun desa, daerah pinggiran, dan perbatasan, termasuk mempercepat peta desa.

Sebagai penutup, penulis memunculkan pembahasan isu baru tentang pemasaran perdesaan, menguraikan bagaimana konsep, strategi dan tahapan yang dapat dilakukan agar dapat mempercepat perkembangan wilayah dan daya saing perdesaan.

Dengan uraian pembahasan yang disajikan secara cukup meluas dan detail, buku ini patut menjadi referensi bagi berbagai pihak dalam melakukan kajian maupun praktik kebijakan mulai dari level pusat sampai desa untuk mengembangkan wilayah perdesaan dengan perspektif keruangan. **[Rochmad Budi Santoso, 2018]**

Judul Buku : PENGEMBANGAN WILAYAH PERDESAAN (PERSPEKTIF KERUANGAN)
Penyusun : Dr. Lutfi Muta'ali, S.Si. MSP.
Penerbit : Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG) Universitas Gadjah Mada, 2016